



PAD Sulsel Naik di Masa Pj Gubernur

PAD Sulsel Naik di Masa Pj Gubernur

● Terbesar dari Sektor Pajak Daerah ● Pengamat: Perbanyak Investasi Jika Ingin Pendapatan Bertambah

MAKASSAR, TRIBUN - Pendapatan daerah Sulsel bertumbuh pesat di tahun 2024 ini. Terhitung September 2024, pendapatan daerah sudah menembus angka Rp7,1 triliun. Realisasi ini mencapai kisaran 71,33 persen dari target di angka Rp10 triliun lebih. Dari realisasi tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsei menyumbang Rp3,7 triliun. Pendapatan ini berasal dari tiga sumber pendapatan yak-

■ ke halaman 7

PAD Sulsel Naik di Masa Pj Gubernur

Sambungan Hal.1

ni, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara detail disebutkan, dana transfer sebesar Rp 3.396.983.423.821,00 atau sekitar Rp 3,3 triliun. Angka ini sudah mencapai 74,53 persen dari target Rp 4,5 triliun.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, berada di angka Rp5,7 miliar. Realisasinya 58,66 persen dari target Rp9,8 miliar.

Kenaikan PAD ini terjadi selama masa kepemimpinan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin dan Prof Zudan Arif Fakhrulloh menjabat selama dua tahun terakhir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, Reza Faisal Saleh, beberapa waktu lalu, optimistis pendapatan daerah bisa tercapai hingga 100 persen di sisa tiga bulan lagi.

"Kita optimistis karena tahun lalu juga itu cukup baik. Jadi kita optimistis Insya Allah sampai Desember tahun ini kita bisa 100 persen," katanya.

Dibanding September tahun 2023 lalu, realisasi pendapatan daerah Sulsel

lebih baik pada 2024 ini.

September 2023 lalu, realisasi pendapatan hanya di angka Rp6,5 triliun atau 64,69 persen.

Realisasi pendapatan daerah pada akhir 2023 lalu pun hanya sekitar 94 persen.

Dengan tren positif ini, Reza optimistis realisasi pendapatan daerah tahun 2024 bisa menyentuh 100 persen.

Pajak Daerah

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel Supendi mengatakan komponen PAD masih ditopang oleh pajak daerah.

Pada periode tersebut nilainya mencapai Rp4,43 triliun.

Angkanya pun tumbuh 0,20% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp4,42 triliun.

Pajak daerah masih didominasi dari sektor non-konsumtif dengan realisasi terbesar pada pajak kendaraan bermotor (PKB) senilai Rp1,12 triliun.

Kemudian disusul oleh bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp650,5 miliar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp616,77 miliar, dan pajak penerangan jalan Rp442,56

miliar.

Sedangkan pada pajak konsumtif, realisasi paling besar ada pada pajak restoran sebesar Rp208,43 miliar, kemudian disusul pajak hotel sebesar Rp98,69 miliar, pajak hiburan Rp19,60 miliar, dan pajak parkir Rp12,19 miliar.

Sementara itu, komponen pendapatan lainnya di Sulsel selain pajak daerah, ada kekayaan daerah dipisahkan yang realisasinya hingga Agustus 2024 tercatat sebesar Rp378,1 miliar, tumbuh 5,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Retribusi daerah yang terkumpul Rp282,23 miliar mengalami pertumbuhan paling besar mencapai 19,13%, di mana pada periode Januari-Agustus 2023 realisasinya hanya Rp236,91 miliar.

"Ada juga lain-lain PAD yang sah di Sulsel telah terkumpul Rp1,43 triliun. Angkanya juga tercatat lebih besar dibanding tahun lalu atau tumbuh 7,35%," tuturnya melalui keterangan resmi, Selasa (8/10).

Banyak Investasi

Pengamat pemerintahan Bastian Lubis menilai, peningkatan pendapatan

daerah di tahun 2024 ini menunjukkan banyaknya investasi yang masuk ke daerah ini.

Namun untuk menilai ke-makmuran masyarakat, ia mengaku perlu melihat keberpihakan APBD terhadap masyarakat.

Bastian menilai pertumbuhan PAD Sulsel masih di angka normal saat ini.

Sebab, Sulsel merupakan daerah strategis sebagai gerbang perekonomian di Indonesia Timur.

"Kalau pertumbuhan PAD saya lihat normal saja karena kegiatan ekonomi masyarakat itu pada dasarnya pertumbuhan lambat. Kecuali ada penambahan investasi swasta yang menyerap lapangan kerja," jelas Bastian Lubis ketika diwawancarai, Rabu (9/10).

Bastian mengaku pemerintah daerah tidak boleh hanya bertumpu pada pajak dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Pemda harus mampu memanfaatkan kelebihan daerahnya untuk menarik minat investasi.

Dijelaskan, ketika ada investor yang melirik untuk menanamkan modal maka akan berdampak pada pendapatan daerah. (qih)